



Jurnal Edita

Editor Akademik

Pusat Studi Informasi, Dokumentasi, dan Kesejarahan (PUSINDOK)



Daftar Isi

Pemilihan Gubernur Pasca Orde Baru: Pengalaman
Provinsi Banten pada Tahun 2001 dan 2006
Leo Agustino

Perbandingan Strategi Caleg perempuan dalam
Memenangkan Kursi di Parlemen
Seli Naswati

Hamka dan Natsir:
Pemikiran dan Sikap Tokoh Islam Dalam Negara
Wannofri Samry

Hubungan Islam dan Negara di Indonesia:
Mempertimbangkan Pemikiran Kenegaraan Cak Nur
Yudhi Andoni

Tentang Isi dan Konteks Historis Sepucuk
Surat Kerajaan Buton dari Abad ke-17 (Leiden K.ark. 93 (5))
Suryadi

Komersialisasi dan Diferensiasi pada Sebuah Desa
Perbatasan Sumatera Barat, 1973-1993
Nopriyasmann

e135: HAMKA on Madilog Tan Malaka
Sawirman

Desensi

Historiografi Musik Indonesia: Dari Hobi Hingga Bisnis



Perbandingan Strategi Caleg perempuan dalam Memenangkan Kursi di Parlemen

Selli Naswati*



Repro. Majalah Aneka Minang, 2 Februari 1972

* Staf pengajar Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Padang (UNP), Sumatra Barat

I. Pendahuluan

Pemilu legislatif 9 April 2009 lalu menunjukkan adanya peningkatan jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat yang berjenis kelamin perempuan. Bila pada tahun 2004 lalu tercatat jumlah perempuan yang menduduki posisi sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar sebanyak 5 orang, maka sekarang ini menjadi 7 orang dari total 55 kursi yang tersedia. Jumlah ini merupakan yang terbesar bila dibandingkan dengan anggota DPRD perempuan di 18 kota dan kabupaten yang ada di Sumbar.

Umumnya, jumlah anggota DPRD perempuan pada 18 kota dan kabupaten di Sumbar, berkisar dari 1 hingga 4 orang saja, bahkan ada anggota DPRD kota atau kabupaten yang sama sekali tidak ada anggota DPRD perempuannya (seperti Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok). Menyusutnya jumlah anggota DPRD perempuan juga tampak pada DPRD Kota Padang, bahwa pada periode 2004-2009 terdapat 6 orang anggota DPRD perempuan, namun untuk periode 2009-2014 ini mengalami penurunan hingga 50% yakni hanya 3 orang saja.

Fluktuasi jumlah anggota DPRD provinsi, kota dan kabupaten ini menunjukkan dinamika aktivitas politisi perempuan di Sumatera Barat. Bila ditilik lebih jauh lagi, data di KPU Sumbar untuk pemilihan DPRD Provinsi periode 2009-2014, terdapat 748 calon legislatif (Caleg), sebanyak 240 (32,08%) adalah Caleg perempuan dan 508 (67,92%) adalah Caleg Laki-laki. Sementara Pemilu periode 2004-2009 lalu, diketahui Caleg untuk DPRD Sumbar sebanyak 617 orang dengan Caleg perempuan 163 orang (26%) dan Caleg laki-laki sebanyak 454 (74%). Dari data tersebut tampak adanya peningkatan 6% perempuan dalam berpartisipasi politik level provinsi dan berkompetisi dengan Caleg laki-laki untuk kemenangan suara pada Pemilu 2009.

Agaknya peningkatan jumlah Caleg perempuan dalam berkompetisi guna memperoleh kursi di parlemen tak terlepas dari ditetapkannya UU Pemilu dimana beberapa pasalnya sudah memberikan tindakan afirmatif kepada perempuan. Seperti UU Pemilu No.12/2003, yang menyebutkan agar Partai Politik (Parpol) peserta Pemilu mengikutkan minimal 30% calon legislatif perempuan. Semakin jelas dukungan peluang untuk perempuan seperti tercantum pada UU No.10/2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD yakni pasal Pasal 8 ayat 1

huruf d, mengatur Parpol peserta Pemilu yang harus menyertakan keterwakilan perempuan minimal 30% pada kepengurusan tingkat pusat. Pasal 53 mengatur daftar bakal calon yang diajukan Parpol memuat sedikitnya 30% keterwakilan perempuan dan pasal 55 (2) tentang penyusunan bakal calon, untuk setiap tiga orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu perempuan. Ini maksudnya agar perempuan sebagai Caleg juga berkesempatan menempati nomor urut kecil, sebab nomor urut posisi atas ini diyakini akan memberi peluang besar untuk bisa mendapatkan jatah kursi di lembaga perwakilan. Agaknya pasal ini tak banyak berfungsi karena keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) merevisi pasal 214 UU No.10/2008 ini pada 23 Desember 2008 lalu. Revisi menyatakan pemenang Pemilu adalah peraih suara terbanyak tanpa melihat nomor urut. Jadi diraihnya suara terbanyak tanpa melihat nomor urut, seolah membuka peluang bagi caleg perempuan untuk bisa mendapatkan kursi tanpa harus berada di nomor urutan atas.

Namun seperti diuraikan sebelumnya, tampak bahwa telah terjadi pergerakan naik turun jumlah keterwakilan perempuan di parlemen. Bahwa nomor suara terbanyak tak terlalu signifikan dalam menentukan perolehan kursi di parlemen bagi Caleg Perempuan. Agaknya peraturan itu masih belum menunjukkan efektifitas untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen. Bahkan Caleg perempuan periode 2009-2014 yang sudah menjadi legislator periode sebelumnya, dianggap sudah memiliki modal sosial dan aset politik (seperti sudah dikenal konstituen dengan pengalaman sebagai legislator selama 5 tahun) ternyata tak banyak yang terpilih kembali.

Selain peraturan yang mendukung keberadaan Caleg perempuan untuk bisa memperoleh suara dalam pemilu, dalam konteks lokal Sumatra Barat, terdapat modal sosial lainnya untuk meraup suara sebanyakya, yakni masyarakat Sumbar yang bercirikan budaya lokal sistem matrilineal dan menerapkan sifat egaliter. Bahwa dua ciri spesifik ini dipercaya akan memberikan kontribusi positif bagi Caleg perempuan. Penelitian mengenai upaya Caleg perempuan memenangkan suara pada tahun 2004 lalu membuktikan, bahwa terdapat kontribusi (peran mamak dan saudara laki-laki yang memiliki *power* di tengah masyarakat) kepada Caleg perempuan dalam upaya perolehan suara bagi mereka untuk bisa duduk di DPRD Provinsi Sumbar periode 2004-2009. Namun untuk Pemilu 2009 ini, ternyata strategi demikian tampaknya tak lagi berhasil diterapkan oleh legislator perempuan yang *incumbent* untuk kembali ikut bertarung untuk periode 2009-2014. Dari empat *incumbent legislator* yang

diwawancarai, 3 diantaranya memiliki hubungan kekebarabatan dengan saudara laki-laki yang menjadi figur tokoh adat informal (ayah), politikus di Sumbar (suami dan kakak ipar), tak satupun yang terpilih kembali. Bahkan boleh dikata di Sumatra Barat, hanya satu perempuan anggota legislatif yang duduk di DPRD periode 2004-2009 yang mampu bertahan dan terpilih kembali sebagai anggota periode untuk kedua kalinya.

II. Dermasalahan

Berangkat dari fenomena yang demikian, maka ingin dikaji lebih jauh tentang faktor apa yang menyebabkan mereka tak bisa lagi terpilih sebagai legislator. Apakah segenap daya upaya atau strategi Caleg perempuan untuk kembali memenangkan suara sudah maksimal? Apakah modal sosial berupa nilai-nilai yang dianut (sikap egaliter dan sistem matrilineal dan jaringan dalam konteks dukungan mamak, orang tua dan saudara yang menjadi tokoh masyarakat tak lagi berperan untuk mendapatkan suara dari karib kerabat di kampung? Apakah selama mereka menjadi legislator sudah dirasakan kehadirannya oleh konstituen dan rakyat yang memilihnya atau tidak, sehingga tak lagi dipilih untuk periode kedua, atau memang persaingan politik yang keras dan tajam terkait dengan kebijakan internal sistem Parpol yang menyebabkan mereka tak terpilih lagi? Makalah ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan membandingkan strategi yang dilakukan enam orang Caleg perempuan yang berjuang memperoleh suara dalam konteks politik lokal di Sumatra Barat pada dua periode Pemilu 2004 dan 2009.

III. Setting Sosial dan Konteks Lokal Sumatra Barat

3.1 Arti Perempuan di Masyarakat Matrilineal dan Egaliter Minangkabau

Sumatra Barat akrab dengan kultur dan adat Minangkabau yang egaliter. Selain itu, sistem matrilineal pada masyarakat etnis Minangkabau masih cukup kental dan konsisten dipraktekkan hingga sekarang. Dalam sistem matrilineal, masyarakat menganut garis keturunan berdasarkan pihak ibu dan menjadikan ibu (perempuan) sebagai posisi sentral pada komunitas adat dan keluarga besar (*extended family*) di kaumnya. Di dalam satu kaum itu, terdapat seorang perempuan yang disepakati bersama menjadi orang yang mewakili suara dan aspirasi perempuan di kaum mereka, yang biasa disebut dengan Bundo Kandung. Bahkan ada yang mengatakan bahwa suatu kaum itu punah, tidak ada lagi

eksistensi suku tersebut karena tak ada pihak perempuan di dalam kaum suku tersebut yang melanjutkan keturunan mereka. Jadi tampak jelas bahwa perempuan adalah pelanjut keturunan, perempuan penerima warisan harta pusaka dan gelar adat. Perempuan tersebut berhak mengatur dan mengelola aset atau modal pusaka kaum. Situasi yang demikian, seperti dikatakan Sanday menunjukkan peran besar perempuan yang dituakan dikaumnya yang disebut dengan Bundo Kandung:

"...That women are positioned at the core of the generational family. Largely through this matrilineal social organization, the leading figure in a Minangkabau extended family, usually the oldest sister, is a symbolic 'queen mother,' or 'Bundo Kandung'".

Maka tak salah bila kemudian Wieringa menyebutkan bahwa perempuan etnis minangkabau memiliki posisi yang tidak ter subordinasi, justru sebaliknya dalam posisi yang setara dan sama yang melekat dengan term egaliter. Seperti dikatakannya:

"Women in Minangkabau society have social status in terms of their customs, property ownership, and egalitarianism in the society".

Boleh dikatakan secara keseluruhan dalam konteks adat di Sumatra Barat, perempuan sudah mendapatkan posisi yang setara dan tidak lagi termarginalkan karena statusnya di dalam lingkungan masyarakat adat yang cukup dimuliakan itu. Contoh posisi mulia dan penting itu; keputusan atas nama kaum harus mendengarkan dan didasarkan pada persetujuan kaum perempuan yang diwakili oleh perempuan yang 'dituakan' pada satu suku tertentu itu. Walaupun demikian, sebesar apapun posisi perempuan yang sudah diperhitungkan dan egaliter dalam tatanan adat, masih menjadi tanda tanya apakah sistem egaliter dan matrilineal ini membawa dampak positif pula ketika perempuan berkiprah di sektor publik lainnya seperti kiprah perempuan di ranah politik.

Untuk mengetahui lebih jauh, sesuai dengan permasalahan, makalah ini mencoba menghimpun strategi dan kiprah politisi perempuan di Sumatra Barat dalam perolehan kursi di Parlemen dengan mengumpulkan data dari 4 orang politisi perempuan yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumbar dan DPRD Kota Padang periode

2004-2009 (masing-masing dua orang) serta dua anggota DPRD yang baru pertama kali terpilih pada periode 2009-2014.

3.2. Kapital Sosial

Konsep kapital sosial sejalan dengan konsep modal sosial. Seperti disebutkan Fukuyama, bahwa modal sosial sebagai serangkaian nilai atau norma sosial yang dianut bersama, yang memberikan peluang untuk bisa saling bekerjasama, dan secara luas konsep ini juga dikembangkan oleh James Coleman dalam kajian Sosiologi³. Putnam (1993, 2000) menyebutkan modal sosial sebagai nilai *mutual trust* kepercayaan antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya⁴. Namun dalam makalah ini seterusnya lebih cenderung digunakan pemakaian kata kapital sosial seperti disebutkan Robert M.Z. Lawang. Lawang mendefinisikan kapital sosial memiliki substansi yang sama dengan para ahli sebelumnya. Bahwa Kapital Sosial merupakan suatu institusi yang didalamnya ada interaksi sosial dan sikap individu atau kelompok dengan tiga unsur ciri utama yakni kepercayaan (*trust*), jaringan (*network*) dan nilai-nilai⁵.

Lebih lanjut dijelaskannya bahwa kepercayaan merupakan hasil dari tindakan dan interaksi sosial dimana dalam tindakan sosial merujuk pada apa yang dilakukan antara dua pihak dalam melakukan hubungan timbal balik sebagai upaya mewujudkan harapan dan kepercayaan⁶. Sedangkan jaringan sosial adalah ikatan antar individu, kelompok dan institusi yang terbentuk karena ada hubungan sosial. Jaringan sosial ini berbagai macam bentuknya ada yang disebut dengan jaringan duaan, ganda, berlapis dan sebagainya⁷.

¹ Lihat Peggy Reeves Sanday, "Women at the Center, Life in a Modern Matriarchy" Ithaca: Cornell University Press, 2002, hal. 20.

² Lihat Saskia Wieringa "Subversive Women", New Delhi: Raj Press, 1995. Hal

³ Lihat Francis Fukuyama, "Modal Sosial" dalam *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, ed Lawrence E Harrison dan Samuel P Huntington, Jakarta: LP3ES, 2002. hal 153 dan hal 157.

⁴ Mardian, "Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik", diperoleh dari <http://mardian.files.wordpress.com/2008/05/konversi-modal-sosial-memuju-modal-politik.pdf>. 11 Juli 2009.

⁵ Lihat Robert M.Z. Lawang, "Kapital Sosial, Dalam perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar" Depok: FISIP UI Press, 2004. Hal 45 dan 70.

⁶ Ibid. Hal.61

⁷ Ibid, Hal.61-67

Kajian tentang tiga unsur kapital sosial, yang meliputi nilai, jaringan dan kepercayaan menjadi bagian sentral saat menguraikan strategi Caleg dalam upaya mendapatkan kursi di Parlemen dalam makalah ini. Seperti tampak dalam tabel berikut:

Tabel 1. Kapital Sosial dalam konteks Sumatera Barat

NO	Kapital Sosial	Sumber
1	Nilai-nilai	Nilai tradisional masih berlaku: Egaliter, system matrilineal
2	Jaringan	Tokoh masyarakat informal, figur pimpinan suku, adat, agama (Datuk penghulu, tuanku malin)
3	Kepercayaan	Komunitas masyarakat yang fanatik; adat dan agama, dan konstituen sebagai basis massa

Maka dalam mewawancawai 6 orang informan, item pertanyaan tak terlepas dari unsur yang terkait dengan kapital sosial tersebut. Bagian berikut merupakan bahasan tentang data informan.

3.3. Data Informan

Informan yang berjumlah enam orang dianggap peneliti sementara waktu cukup mewakili untuk kepentingan penulisan makalah. Variasi informan antara lain 4 orang asli berasal dari etnis minang dan 2 orang non Minang, namun sudah lahir dan besar di lingkungan masyarakat Minang. Juga ditemukan sejumlah perbedaan yang dianggap mewakili sejumlah variasi Caleg DPRD perempuan di Sumbar, seperti Caleg berasal dari partai politik yang sudah eksis di panggung politik sejak masa orde baru, atau disebut pemain lama dan Partai pendatang baru yang cukup fenomenal bisa mengantarkan Capresnya menjadi RI 1. Berikut adalah Tabel No.1 dan No.2 dari hasil rekapitulasi informan yang ditemui dilapangan:

Table 1: Data Informan Aleg Incumbent periode 2004-2009

No	Nama dan asal	Pekerjaan	pendidikan	Pengalaman Kerja dan Organisasi (jaringan yang dimiliki)	MODAL SOSIAL	Keluarga
1	Rosy (asli minang)	1. Aleg DPRD Surbar (2004-2009) 2. Dosen PTS	DR(S)	1. Aktifis Organisasi Perempuan. 2. Aktifis Partai (FEB) sejak 1999	Ayah sebagai Datuk penghulu di Tanah Datar (Hutus Di Rajo Hakim)	- Menikah Surri sebagai dosen -dalarak
2	Mrs. Minang besar d Jakarta, ikut surri d Surbar	1. Aleg DPRD Padang Periode (2004-2009) 2. Wirausaha	Diploma 3	1. Aktifis organisasi mahasiswa. 2. Aktifis Partai politik (PKS) sejak 1998.	Surri anggota DPRD periode 2004-2009	Menikah, surri politikus, aktifis partai yang sama -dalarak
3	Yossy (Asli Minang)	1. Aleg DPRD Padang Periode 2004-2009 2. Mengajar penuh waktu d PTS	Master program (M)	1. Sebelumnya sempat sebagai aktifis giber, 1998 2. Sejak aktifis sebagai FEB 3. Aktifis majelis taklim	Ketek ipar politikus	Belum menikah

4	Yeny (asli Jawa, lahir dan besar di Sumbang)	1. Aleg DPRD Padang periode 2004-2009 2. Aleg DPRD Padang Periode 2009-2014 3. Wirasaha	Sajana S-1	1. Aktifis organisasi Islam sejak 2. Mahasiswa dan aktivis partai sejak 1999 (PKS) 3. Kelompok pemberdayaan masyarakat	Tidak ada	Menikah, suami pekerja di salah satu BUMN. -4 anak usia 5-14 tahun
---	--	---	------------	---	-----------	--

* bukan nama sebenarnya.
Tabulasi data oleh peneliti

Tabel 2. Data Informan Aleg Terpilih Pertama kalinya (periode 2009-2014)

No	Nama*	Pekerjaan	pendidikan	K.A.P.I.T.A.L (modal) S.O.S.T.A.L		Keluarga
				Pengalaman Kerja dan Organisasi (Jaringan yang dimiliki)	Anggota keluarga yang mempengaruhi kegiatan Politik	
5	Prima (etnis Tiong Hoa, lahir dan besar di Padang)	1. Guru SMU swasta favorit di Padang 2000. 2. Wirasaha bidang agen perjalanan	Sajana (S-1)	1. Aktifis organisasi kemasyarakatanis Tionghoa. 2. Bergabung dengan Partai Demokrat sejak 2003	Tidak ada	Menikah, hidum terpisah dengan Suami yang berwirasaha di Jakarta -1 anak (8 tahun)
6	Siti (asli etnis Minang)	1. Swasta	Masih pendidikan master program (MM) di UNP	1. Aktifis organisasi mahasiswa dan KNPI Sumbar 2. Aktifis Partai Golkar sejak tahun 2000 3. Ketua Bundo Kandung Kota Paritaman	1. Kakak kandung sebagai Datuak, pimpinan Suku Pakandangan. 2. Ayah yang dipanggil buya, tokoh informal dan disegani di kalangan masyarakat yang biasa dipanggil 'Tuanku Haji'	Menikah, suami wiraswasta kosstruksi bangunan Anak 4 usia 9-16 tahun

* bukan nama sebenarnya.
Tabulasi data oleh peneliti

IV. Diskusi Temuan Data

Dalam bagian ini sejumlah temuan atas data informan didiskusikan sesuai dengan topik masing-masing sub-judul di bawah ini.

4.1 Strategi Incumbent

4.1.1 Pemetaan Wilayah

Dari 4 orang informan yang diwawancarai, anggota legislatif (Aleg) 2004 dan Caleg 2009, (selanjutnya disebut Aleg/Caleg) semuanya mengakui telah mengupayakan beberapa langkah untuk bisa duduk lagi di lembaga dewan perwakilan. Diantaranya menerapkan strategi pemetaan wilayah, mempelajari dan mengetahui secara persis kondisi wilayah yang menjadi basis massa mereka, melakukan turba menemui konstituen secara rutin, tatap muka, sosialisasi program kebijakan pembangunan pada wilayah yang menjadi basis massa dan mendatangi dengan intens wilayah tersebut, dengan dibantu tim sukses dan pendukung lainnya.

Karena mereka sudah untuk kedua kalinya bertarung memperebutkan kursi di parlemen, mereka yakin dan optimis suara yang diperoleh sudah bisa diperkirakan. Berbeda dengan tahun 2004 lalu, ada informan yang mengakui bahwa saat itu sebagai Caleg, ia tak tahu persis perkiraan perolehan suara yang akan didapat dan belum serius melakukan pemetaan pada wilayah pemilihannya.

"Saat itu melakukan kampanye dan turba berbarengan dengan Caleg politikus senior lainnya yang kebetulan memiliki wilayah Dapil yang sama dengan saya. Jadi kami sama-sama kampanye dengan menghimbau agar memilih kami, saya untuk DPRD Provinsi Sumbar dan caleg itu (menyebut satu nama-red) untuk DPR-RI. Saya benar-benar masih *learning by doing*, tapi untuk 2009 ini agak sedikit berbeda, saya turba sendiri dan meyakinkan konstituen melalui pertemuan kelompok, mendatangi dan mempersuasi mereka agar menetapkan pilihan yang sama seperti tahun 2004 lalu..." (wawancara informan incumbent No.1, Senin, 29 Juni 2009).

Jadi tampak ada beda strategi antara aktifitas yang dilakukan pada tahun 2004 dengan 2009. Informan ini tampaknya mendapatkan nilai positif dari konstituen pada periode pertama ia terpilih karena datang

ke Dapil bersama dengan politikus senior yang sudah lebih dulu berkiprah dan dikenal masyarakat. Meski ia sendiri juga merupakan anak seorang Datuk Penghulu, dan disegani masyarakat dikampung ayahnya itu, perolehan suara banyak tak hanya di wilayah tempat daerah asal, tapi juga dari hasil jalan bersama dengan politikus senior ini.

Ketika memasuki Pemilu 2009, Aleg/Caleg ini tak lagi berdampingan dengan politikus senior tersebut (kebetulan meninggal dunia 1.5 tahun lalu), sehingga strategi yang dilakukan dengan melakukan pemetaan wilayah dan fokus menggarap wilayah yang diyakini banyak konstituen cenderung dilakukan dengan upaya klasik dan standar seperti; turba, sosialisasi dan mengadakan kegiatan program sesuai dengan kapasitasnya sebagai Aleg periode 2004-2009 di daerah asal pemilihan, khususnya di wilayah kampung halaman (daerah kabupaten/Kota).

Umumnya ke empat Aleg/Caleg optimis bisa meraup suara dari konstituen pada Dapil yang mereka wakili, paling tidak jumlahnya tak akan selisih jauh dengan perolehan suara seperti tahun 2004 lalu. Optimisme itu terungkap dari pengakuan mereka yang sudah melakukan strategi pemetaan wilayah terkait dengan kantong wilayah yang diperkirakan masyarakatnya pasti memberikan suara pada para Caleg ini. Konstituen mereka yang mayoritas berada pada wilayah daerah asal mereka, diyakini akan memberikan suara karena sudah 'dibina' selama lima tahun terakhir. Dibina artinya juga sering dikunjungi, didatangi, berdiskusi dan menjadi penyalur aspirasi serta bila perlu memberi bantuan moril material kepada mereka sebagai anggota masyarakat.

Hanya saja, kebijakan Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan perolehan suara terbanyak turut mempengaruhi keterpilihan, apalagi kebijakan tersebut dikeluarkan pada waktu yang berdekatan dengan waktu pemilihan, sehingga tak punya banyak waktu untuk mensosialisasikan, mempengaruhi dan memastikan konstituen mereka untuk tak beralih pilihan terkait dengan makin banyaknya Caleg dari Parpol (baru). Oleh karena itu Caleg benar-benar harus kerja keras meyakinkan konstituennya untuk tidak mengubah pilihan, apalagi kalau konstituen diiming-imingi material dan finansial oleh Caleg dari Partai (berbeda dan baru) lainnya, maka bisa saja sistem suara terbanyak menjadi bumerang bagi Aleg dan Caleg perempuan yang hanya mengandalkan kepercayaan konstituen yang sudah memilihnya lima tahun lalu. Sikap konstituen dimata Aleg/Caleg ini sangat beragam, ada yang bisa dipercaya, pun banyak yang bisa beralih pilihan. Seperti dikatakan salah seorang informan:

"Pemilih kadang sangat cepat berubah pilihan, dan yang loyal kadang bisa beralih, maka sistem suara terbanyak mau tak mau membuat Caleg kerja lebih keras lagi. Bahkan saya awalnya memiliki target suara pribadi akan diperoleh sekitar seribu suara, nyatanya tak tercapai (Aleg ini mendapat 700-an suara pribadi). Jadi kalau kampanye seperti prospek asuransi saja, kita cari nasabah, artinya tiap turba, pastikan konstituen memilih nama kita. Bukan Partai.." (wawancara informan incumbent No.4, senin 15 Juni 2009)

Senada dengan ini, informan lainnya mengatakan bahwa kadang konstituen sulit memahami kondisi Aleg. Adakalanya bersikap tidak rasional dan menganggap mereka sudah 'begitu berjasa' memilih Aleg sehingga harus diikuti kemauannya:

"Kadang konstituen kita cenderung beranggapan bahwa kita duduk di DPRD, berkat suara yang diberikan, dan menikmati banyak fasilitas serta gaji yang besar. Jadi konstituen ini seperti memiliki banyak tuntutan; harus mendapat perhatian ekstra, termasuk soal bantuan dana, urusan keluarga pun datang berharap meminta dana ke anggota Dewan. Padahal sebagai anggota dewan, tugas kedewanan adalah semua yang terkait dengan persoalan rakyat dan masyarakat di wilayah kita yang memang luas juga. Jadi konstituen memiliki banyak tuntutan dan kadang merasa terabaikan bila tuntutan tak terpenuhi." (Informan incumbent No.3, wawancara Jumat 29 Mei 2009).

Dari pernyataan itu tampak bahwa meski sudah ada strategi pemetaan wilayah, tapi tetap tak ada jaminan keyakinan konstituen akan memilih kembali. Sejalan dengan strategi pemetaan wilayah yang menggarap kampung halamannya masing-masing, kendala lain yang mereka temukan adanya perbedaan konstituen tahun 2004 dengan 2009 yang dinilai Aleg/Caleg makin 'berani' dan tak lugu seperti dulu lagi. Konstituen yang semakin 'cerdas' langsung membuat *bargain* dengan Aleg/Caleg. Seperti dialami salah seorang informan, isu kelangkaan pupuk baru-baru ini menjadi topik hangat saat pertemuan yang mereka bahas. ketika saat Aleg/Caleg ini turba dan audiensi dengan konstituen, secara terang-terangan petani di wilayah yang dikunjungi itu menyatakan akan memilih Aleg/Caleg ini lagi bila mampu mengatasi persoalan

kelangkaan pupuk yang sedang mereka alami dengan langsung membawakan pupuk yang dibutuhkan. Menanggapi sikap konstituen yang demikian, Aleg/Caleg ini tak berani menjanjikan akan melampirkan mereka atas kelangkaan pupuk dengan menyediakan pupuk atau menyediakan dana kontan untuk pembeli pupuk. Seperti diungkapkannya:

Saya menanggapi *bargain* tersebut dengan menjelaskan tentang proses penyebab kelangkaan pupuk. Tidak mengiyakan keinginan konstituen tersebut, takut hanya sekedar janji muluk. Juga tidak menyediakan dana *cash* untuk pembeli pupuk. Maka saya menjelaskan hal sebenarnya secara teknis kenapa pupuk langka, tak bisa diselesaikan satu atau dua orang saja, tapi kalau saya terpilih nanti, akan ada kebijakan sekaitan dengan distribusi pupuk tersebut agak tak terjadi kasus kelangkaan" (Informan incumbent No.1, 29 Juni 2009)

Dari wawancara tampak bahwa strategi *to the point*, tidak memberi iming-iming dan tanpa banyak janji muluk menurut informan ini dianggap efektif untuk menarik hati pemilih. Ia pun tak menyediakan dana langsung untuk perseorangan.

Terkait dengan bantuan kontan ini, para Aleg/Caleg lain juga memiliki kesamaan pendapat bahwa mereka tak perlu memberi orang-perorang dana kontan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang lagi tren di terima banyak masyarakat kalangan bawah. Meski harus ada biaya politik yang dikeluarkan, pengakuan mereka, cenderung diberikan kepada komunitas, kelompok, bukan perorangan. Seperti organisasi karang taruna, remaja mesjid, kelompok tani, dan pengajian.

4.1.2. Kapital Sosial

Keempat Aleg/Caleg sepakat bahwa kapital sosial berupa jaringan, organisasi dan dukungan kerabat sangat penting dalam upaya meraup suara sebanyak-banyaknya. Berdasarkan data pada tabel informan, semuanya memiliki jaringan organisasi yang sudah mereka geluti sejak lebih dari 10 tahun lalu, entah itu mereka sebagai aktifis organisasi sosial kemasyarakatan atau kampus. Pastinya, mereka sudah memasuki organisasi politik atau Partai Politik pada momen usai gerakan reformasi 1998 lalu. Seiring dengan terbukanya kran reformasi dan banyaknya partai baru yang bermunculan, perempuan seperti menemukan wadah

untuk berpartisipasi politik, mereka terlibat dengan beragam pilihan partai politik. Bahkan pemerintah dengan kebijakan quota 30% bagi perempuan turut memberi peluang perempuan untuk terlibat sebagai kandidat legislasi.

Kapital sosial lainnya yang juga menjadi aset politik terutama dalam konteks lokal Sumatra Barat tampak ketika para Aleg/Caleg memanfaatkan nilai budaya setempat dalam bentuk mendapat dukungan kerabat, anggota keluarga besar yang juga dekat dengan kegiatan politik dan menjadi publik figur di tengah komunitasnya. Dari 4 incumbent ini, 3 diantaranya memiliki hubungan dengan kerabat laki-laki seperti ada Aleg/Caleg yang ayahnya sebagai Datuk Penghulu pada suku dan kaumnya, suami dan kakak sebagai politikus di tingkat Sumatra Barat. Sebagai tokoh informal di tengah masyarakat, sang Datuk Penghulu yang terpancipang ini turut mempengaruhi keterpilihan Caleg. Datuk Penghulu mengajak ninik mamak dan kemenakannya untuk memberikan suara pada Caleg yang menjadi kerabat mereka. Pengakuan seorang Aleg/Caleg, ia selalu melekatkan nama ayahnya di belakang namanya pada setiap spanduk, pamflet, bahkan baliho yang dipajang, baik periode 2004 lalu atau yang 2009 kemarin ini. Sejalan dengan itu Aleg/Caleg ini berpendapat bahwa masyarakat pemilih masih cenderung mendukung dan memilih orang yang mereka kenal, maka dengan melekatkan nama ayahnya itu diharapkan akan dikenal sebagai anaknya Datuk yang disegani orang sekampung.

Pengakuan informan lain, dengan adanya suami sebagai politikus dan kakak yang juga politikus, strategi pemenangan suara bisa diperoleh lewat dukungan dan bantuan mereka dalam bentuk mempengaruhi, mengajak relasi suami untuk memilih mereka, termasuk saat melakukan lobi politik atau pertemuan-pertemuan. Para Aleg dan Caleg ini tidak menafikan perlunya anggaran dana untuk berkampanye dan mendapatkan suara konstituen, tapi hal-hal bersifat non materil pun, seperti dampingan dari orang yang sudah biasa di dunia politik amat mendukung. Hanya saja dari 3 informan tersebut, meski sudah memanfaatkan strategi dan mendayagunakan kapital sosial yang dimiliki, entah itu dalam kelompok organisasi majelis taklim, organisasi perempuan dan kelompok pengajian, tampaknya masih belum bisa mendongkrak perolehan suara mereka. Meski biaya material finansial untuk ongkos politik yang mereka keluarkan lebih besar dari Pemilu tahun 2004 lalu, ternyata masih belum bisa menjamin akan terpilih lagi. Justru yang terpilih kembali dari 4 incumbent ini bukanlah Aleg/Caleg yang memiliki kerabat dekat seperti

tokoh informal. Informan No.3 adalah (satu-satunya Aleg perempuan di Sumbar) yang duduk kembali untuk kedua kalinya di parlemen. Informan ini tidak memiliki hubungan kerabat dengan tokoh informal, namun suaminya mendukung sepenuhnya atas aktifitas politik yang dilakukan. Ia pun menganggap bahwa salah satu bentuk aset politik yang mesti dimiliki Caleg, kepercayaan konstituen merupakan modal besar yang harus tetap dijaga. Diungkapkannya:

"Saya sering interaksi, berbincang dan memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok kecil yang membutuhkan, misalnya dengan kelompok pedagang ikan segar keliling, pedang buah keliling, kelompok seni tradisional. Saya berdialog dengan mereka dan membantu kebutuhan kelompok, misalnya dengan membelikan alat musik, bantuan dana untuk tambahan modal dagang mereka. Jadi kerjasama yang begini lebih membangun figur saya dengan kedekatan emosi. Meski tak dinafikan juga ada loyalitas yang diukur dengan materi," (wawancara informan No.4, Senin 15 Juni 2009).

Diungkapkan juga oleh informan ini bahwa kepercayaan konstituen itu sangat penting baginya, tapi lebih sangat penting lagi menjaga kepercayaan konstituen yang sudah diperoleh 5 tahun lalu. Maka ia tak segan-segan secara rutin menghabiskan waktu akhir minggunya untuk mendatangi konstituen, turba, mengadakan program binaan, berdiskusi, dan tatap muka lainnya kepada konstituen. Seperti disebutkannya:

"Kepercayaan dari masyarakat sangat penting, mending kehilangan waktu istirahat atau tidur daripada kehilangan kepercayaan masyarakat. Karena susah membentuk kepercayaan itu lagi. Maka harus *all out* berkunjung ke konstituen, 40 jam di kantor dewan seminggu, 4 jam perhari selama 7 hari sekitar 28 jam di wilayah konstituen, malah kadang lebih karena Sabtu Minggu biasanya mulai dari pagi, maka ada jadi sekitar 36-an jam seminggu untuk konstituen. Ini saya lakukan rutin terutama sejak 3 tahun terakhir ini". (Wawancara Informan incumbent No.4, Senin 15 Juni 2009).

Jadi tampaknya Aleg/Caleg satu ini memanfaatkan aspek kapital sosial, tak hanya melalui jaringan, dan nilai-nilai yang dianut di masyarakat Sumbar dan partai politik yang menaunginya, namun kepercayaan konstituen juga tetap dijaga.

4.2 Strategi Aleg Terpilih Pertama kalinya

4.2.1. Pemetaan Wilayah, Fokus dan Konsisten

Sama halnya dengan Caleg incumbent, dua informan yang baru saja terpilih untuk pertama kalinya sebagai Aleg ini mengaku memiliki strategi menerapkan sistem pemetaan wilayah yang sudah dipelajari berdasar pengalaman ketika Pemilu tahun 2004 lalu. Dapat dipahami, karena mereka 'pemain lama' atau orang yang dulunya juga sudah bertarung di arena politik, namun masih sebatas penggembira, tidak terpilih menjadi anggota dewan karena saat itu mereka sebagai Caleg dengan nomor urut 5 dan 7. Lagipula sistem Pemilu 2004 ketika itu tidak mengenal suara terbanyak, hanya berdasar nomor urut belaka.

Informan No.5 yang menjadi caleg nomor urut 2 pada Pemilu 2009 ini mengaku belajar dari pengalaman gagal tahun 2004 lalu. Bahwa dulu tahun 2004 lalu ia ditempatkan pada Dapil IV (Wilayah Padang Selatan, Bungus Teluk Kabung) suara yang diperoleh ketika itu cukup banyak (1.500 suara), bahkan kalau memakai sistem suara terbanyak sudah bisa duduk, hanya karenaposisinya pada nomor urut yang besar, makanya tak terpilih.

Belajar dari situasi 5 tahun lalu itu, strategi yang dipakai pada Pemilu 2009 ini ia mempelajari peluang dimana suara dari massa bisa banyak diraih dan bagaimana agar nomor urut dapat yang kecil. Awalnya pimpinan Parpol meletakkan Aleg informan nomor 5 ini sebagai caleg pada Dapil II, namun setelah dipelajari, ternyata peluang di sana kecil, karena sesama Caleg dari Parpol yang sama saling bersaing, lagipula nomor urutnya jadi nomor urut 4 dan massa yang ingin diperoleh suaranya cukup ketat bersaing dengan Parpol lain. Akhirnya ia pelajari lagi dan sampai pada keputusan minta pindah wilayah pemilihan:

"Kita harus pintar baca dan lihat situasi, setelah saya pelajari, saya berkesimpulan kalau saya mau dapat banyak suara, saya harus ke Dapil I, Padang Barat dan Padang Utara, saya perkiraan disini saingan kecil dan ternyata memang di wilayah ini saja saya dapat seribu delapan ratus suara dan di Padang Utara tiga ratus tujuh puluh

tiga suara." (Wawancara Informan No.5, Sabtu 13 Juni 2009).

Dari pernyataan tersebut tampak bahwa informan ini menganalisis dan melakukan pemetaan secara realistis mengenai jumlah massa yang dimiliki dan luas lahan yang diperebutkan.

Strategi menggarap wilayah yang menjadi basis massa dengan konsisten dan fokus tampak pula pada informan nomor 6. Informan ini sebagai Caleg dari Dapil II Sumbar (terdiri dari Kabupaten Agam, Kota Bukittinggi, Kota Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman). Caleg ini hanya melakukan audiensi, turba dan mendatangi berbagai basis massanya pada satu-satunya wilayah daerah kampung asalnya saja di kawasan Kabupaten Padang Pariaman persisnya di wilayah Kayutanam, Sicincin, Pakandangan, Ulakan, Nan Sabaris dan kecamatan 6X11 Enam Lingkung.

Keyakinan dan konsistensi menggarap satu lokasi Kabupaten Padang Pariaman yang juga menjadi kampung asal si Caleg menjadi strateginya. Hal itu karena sebelumnya sudah mempelajari karakteristik penduduk dan budaya daerah Kabupaten Padang Pariaman tersebut yakni dengan cara mendekati komunitas dan kelompok serta penduduk yang menjadi basis massa, mengumpulkan keluarga besar Ninik Mamak dan Datuk.

"Setelah mengumpulkan semuanya dan menghimpun kekuatan yang bisa dimiliki, maka saya intens berada di kampung ini, bahkan selama 6 bulan menjelang Pemilu rutin hidup berdekatan dan melakukan berbagai kegiatan dengan masyarakat dan kelompok organisasi di kampung. Pulang ke Padang, tempat keluarga menetap, hanya sekali seminggu sekadar ganti ganti pakaian dan mengisi kulkas yang kosong. Bahkan mungkin tidak percaya bahwa ada acara kampanye akbar partai Golkar di Bukittinggi mendatangkan pimpinan pusat, saya tidak hadir di sana, karena waktunya bentrok dengan kegiatan di lokasi basis massa saya, saya lebih memilih yang terakhir ini, namun dipertanyakan banyak kolega partai." (Wawancara informan No.6 Sabtu, 11 Juli 2009).

Pernyataan informan di atas menunjukkan keteguhannya untuk tetap fokus pada wilayah kampung asalnya itu, bahkan disebutkan informan ini selama Februari-April, menjelang Pemilu ia hanya bisa tidur

3-4 jam saja semalam. Hal itu lantaran banyaknya acara dan kegiatan yang diikuti, karena dalam semalam bisa 2-3 acara. Ini berkaitan juga dengan status informan ini sebagai ketua Bundo Kandung di nagari Sicincin daerah asalnya itu.

4.2.2. Kapital Sosial yang dimiliki.

Kedua Aleg yang baru saja terpilih untuk pertama kalinya ini memiliki 3 unsur kapital sosial, kepercayaan, jaringan dan nilai-nilai masyarakat setempat yang dimanfaatkan untuk pemenangan suara. Ketiga unsur ini cukup menonjol pada kedua informan tersebut, namun dengan karakter yang berbeda.

Jaringan yang dimiliki informan nomor 5 terkait dengan posisinya sebagai pendidik di sebuah SMU swasta favorit di Kota Padang, maka untuk perolehan suara sedikit banyak diperoleh dari murid kelas 3 pemilih pemula dan juga orang tua wali murid. Terkait dengan kepercayaan dan nilai-nilai sosial yang dianut caleg ini, sebagai pihak yang berasal dari etnis Tjong Hoa, dari dulu di Kota Padang ikatan kekerabatan antar mereka cukup kuat. Sebagai kelompok minoritas di Sumbang, etnis ini cenderung terlibat dalam induk organisasi seperti HBT (Himpunan Bersatu Teguh) HTT (Himpunan Tjinta Teman) yang anggotanya umumnya saling kenal dan akrab. Maka melakukan kampanye dari mulut ke mulut, merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pemenangan Pemilu. Apalagi ia lahir, bersekolah dan besar di Kampung Pondok (kawasan Pecinan di Kota Padang). Di wilayah ini, hampir semua warga komunitas etnis tersebut mengenalnya.

"Karena komunitas terikat dalam kesamaan etnis, banyak yang mengenal saya, meski saya tak kenal, tapi mama saya punya banyak kenalan teman-temannya di gereja juga relasi dagangnya, jadi diajak untuk pilih saya. Begitupun dengan teman kakak saya, ketemu di salon, di pasar atau di mana saja, diajak kakak untuk memilih saya yang jadi Caleg. Tapi tetap tim sukses juga saya andalkan untuk mempromosikan agar saya yang dipilih dalam mempengaruhi konstituen. Tapi yang penting kepada konstituen hubungan emosional tetap saya jaga, jadi tak harus kasih duit, kalau memang mereka bersimpati dan mendukung, konstituen sudah percaya bahwa saya dari

etnis mereka akan dicontong untuk Pemilu nanti," (wawancara Informan nomor 5, Sabtu 13 Juni 2009).

Sementara itu informan nomor 6 memiliki kapital sosial dalam bentuk jaringan komunitas kelompok seperti Kelompok Senam Lansia, PKK, Posyandu. Lebih lanjut, ia memiliki posisi atau status dalam lingkungan adat sebagai Ketua Bundo Kandung Kabupaten Padang Pariaman. Posisi jabatan lingkup adat ini amat menguntungkan Caleg ini, sebab institusi adat dan segala kegiatan pada wilayah yang menjadi basis massanya amat dihargai komunitas setempat.

"Sebagai Ketua Bundo Kandung, saya merasa beruntung. Sebab posisi itu merupakan arena yang amat gampang dimasuki Caleg, efektif untuk melakukan sosialisasi, kampanye di setiap even acara adat," (wawancara informan nomor 6, Sabtu, 11 Juli 2009).

Kapital sosial lainnya yang juga tak kalah penting adalah kemudahan akses pada tokoh informal dan tokoh adat dikomunitas yang menjadi basis massanya, karena keluarga dan kerabat dekat berada dalam posisi 'terpandang' di komunitas adat setempat. Kakak kandung Caleg adalah Datuk Penghulu, pimpinan suku Sikumbang, Ayah (Haji Abdul Saleh Tuanku Mudo yang dipanggil Buya) dikenal masyarakat sebagai Tuanku Haji. Tuanku Haji juga dikenal sebagai tokoh informal, orang pertama di Sicincin yang datang ke Kota Padang, ibukota provinsi, bekerja dan menetap di Padang, terakhir Pensiun Wakil Kanwil Kandepag. Otomatis masyarakat setempat mengenal dan menyebut Caleg ini sebagai Anak Tuanku Aji. Situasi yang demikian dipahami sekali oleh Caleg ini. Ia yakin, berdasar pengamatan, pengalaman dan yang telah dipelajari karakteristiknya, bahwa masyarakat Kabupaten Padang Pariaman wilayah basis massanya masih kuat kultur ketokohan informal seperti ninik mamak, tuanku dan kelompok religiusnya. Kondisi ini dijadikan peluang untuk perolehan suara sebanyak-banyaknya.

4.3. Caleg Gagal dan Aleg Terpilih lagi

Dari 6 informan yang digali informasi dan datanya, ternyata 3 orang lolos bisa duduk di lembaga dewan perwakilan sedangkan tiga lagi tidak. Uraian sebelumnya mengenai strategi dan modal sosial yang terkait dengan 6 informan di atas turut mempengaruhi faktor keterpilihan.

Untuk mengetahui lebih jauh penyebab gagal dan suksesnya Caleg ini, selain dari pemanfaatan kapital sosial dan strategi yang dijalankan, bisa pula dilihat dari dua faktor; eksternal dan internal.

4.3.1 Faktor Eksternal

a) Kebijakan Parpol

Kebijakan internal Parpol agaknya turut sebagai salah satu dari sekian banyak faktor mereka terpilih atau tidak. Keterpilihan (elektabilitas) informan nomor 3 ini agaknya juga tak terlepas dari dukungan partainya. Diakui bahwa Partai Politik sebagai kendaraan yang memang memiliki kordinasi cukup bagus dan menganggap semua pihak terlibat dalam kemenangan pemilu. Informan yang bernaung di bawah PKS ini mengakui bahwa kebijakan Parpolnya cukup berperan strategis agar kadernya bisa duduk di parlemen. Parpol bertanggung jawab dalam program membangkitkan kepercayaan konstituen ke Caleg, sebab suara Caleg juga untuk Partai. Agenda Partai melibatkan Caleg/Aleg terpilih dalam tiap program ke massa konstituen.

Bila peran parpol lemah, maka Caleg dalam Parpol yang sama bisa jadi saling sikut-sikutan. Hal ini tampak pada 2 Aleg/Caleg yang tak lagi terpilih, mereka berasal dari Parpol yang menurut mereka terkesan kurang memiliki kekuatan untuk konsisten dengan aturan standar penentuan Caleg, meski sudah ada aturan namun tak sepenuhnya dipatuhi, masih ada kepentingan politisi (laki-laki) untuk mendominasi. Informan No.1 dari PBB, mestinya bisa dalam posisi nomor urut 1, namun 'mengalah' untuk berada di posisi nomor urut 2, karena ambisi koleganya yang juga jadi Caleg lainnya sangat kuat untuk bisa menang. Seperti dikatakannya:

"Secara aturan partai saya bisa pada posisi nomor urut 1, namun kemudian menerima untuk posisi nomor urut 2 dan cukup percaya dan optimis dengan sistem suara terbanyak. Tapi ternyata memang gagal juga untuk duduk lagi" (Wawancara informan no.1 senin 29 Juni 2009).

Sedikit berbeda dengan kegagalan informan nomor 1, kegagalan yang dialami informan No.2 untuk bisa sebagai Aleg lagi terkait beberapa hal misalnya, trik untuk kampanye bareng dengan caleg yang memiliki nomor urut sama untuk Caleg tingkat pusat, provinsi dan kota. Nomor urut Caleg yang sama menurutnya, akan lebih mudah diingat konstituen kalau didatangi 3 orang Caleg dengan nomor urut sama. Selain itu, aturan partai dalam menempatkan dirinya sebagai Caleg ditingkat yang

berbeda saat menjadi Aleg, cukup membuatnya dalam posisi yang kurang menguntungkan:

"Awalnya saya berpikir akan tetap jadi Caleg tingkat kota, tapi kemudian dapat surat pemberitahuan dari Parpol, saya dipastikan ikut dalam Pemilihan Tingkat provinsi Sumbar dan itu waktunya sangat dekat dengan deadline memasukkan nama Caleg ke KPU, sehingga saya tak punya banyak waktu untuk sosialisasi pada Dapil III, 5 wilayah di Sumbar yang menjadi tempat suara saya dihitung. Saya abai dengan strategi untuk memetakan suara terbanyak ada di wilayah mana pada level provinsi, mungkin ini resiko karena dulunya sebagai Anggota DPRD Kota Padang dengan basis massa di Koto Tagah dan Nanggalo." (wawancara informan No.2 Senin 29 Juni 2009).

Jadi terlihat bahwa kebijakan partai menempatkan Caleg pada level yang tak diduga sangat beresiko untuk bisa merebut banyak suara.

b). Sistem dan Praktek Pemilu

Pelaksanaan pemilu legislatif berjalan lancar meski sejumlah protes dari beberapa Caleg gagal sempat bermunculan, namun setidaknya secara keseluruhan hasil Pemilu Legislatif bisa diterima. Hanya saja masih tetap ada penilaian minus dari Caleg yang mengalami langsung dua kali proses Pemilihan 2004 dan 2009. Menurut informan nomor 2, sistem Pemilu kali ini banyak suara Caleg yang hilang. Bahwa dalam proses penghitungan suara tak ada jaminan bahwa suara Caleg tidak hilang. Seperti dikatakannya:

"Diprediksi suara hilang itu banyak, karena ada sekitar tiga ribu lebih TPS di Sumbar, kalau Pemilu 2004 suara dari TPS dibawa ke kelurahan dulu dan ada tabulasi dan lengkap dengan formulis C1 di kelurahan. Namun Pemilu 2009 ini dari TPS langsung ke Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kecamatan, tak lagi ke kelurahan, sehingga aturan yang dibuat KPU ini rawan dengan kehilangan suara, walaupun mau protes harus ada formulir C1, Nah formulir C1 juga tak ada. Selain itu dijumpai pengelembungan suara," (wawancara informan incumbent nomor 2, Senin 15 Juni 2009).

Senada dengan pernyataan informan nomor 2, informan nomor 4 juga merasakan perbedaan signifikan pelaksanaan sistem Pemilu 2004 dengan Pemilu 2009. Bahkan ia menyebutkan adanya pembelokan isu Pemilu Legislatif yang dikaitkan dengan isu Pilpres. Disebutkannya:

“Ada isu yang dihembuskan di tengah masyarakat bahwa siapa yang ingin presiden SBY terpilih, maka pilih partai tertentu, padahal dalam Pemilu Legislatif, tak ada hubungan dengan pilihan Parpol. Akhirnya Caleg yang murni bekerja dapat suara memenuhi BPP, tapi karena suara partainya sedikit tak memenuhi kuota, tak terpilihlah Caleg ini sebagai Aleg,” (Wawancara Informan No.3, Jumat 29 Mei 2009).

Kondisi lain yang diamati para Caleg gagal ini adalah kertas lembaran untuk mencontreng, yang berisi nama-nama Caleg, lumayan besar sehingga membuat konstituen kerepotan dan kebingungan menentukan mana yang akan dipilih mengingat foto Caleg di lembaran tersebut. Apalagi bila konstituennya tak teliti dan ingin yang mudah saja. Seperti dikatakan informan nomor 2:

“Banyak konstituen umumnya suka yang simpel saja, cenderung memilih caleg pada urutan atas dan abai melihat keseluruhan gambar Caleg atau nomor urut yang berada di bagian bawah, yah mungkin kerepotan juga dengan lembaran kertas yang besar itu” (Wawancara Senin, 15 Juni 2009).

Masih terkait dengan konstituen, kendala lain yang ditemukan adalah pandangan konstituen dan masyarakat umumnya yang masih cenderung bersifat primordial. Seperti dikatakan informan no 1:

“Konstituen masih memilih Caleg berdasar kesukaan. Banyak yang masih berpikir, lebih baik *urang kampuang awak nan naiak. Urang yang awak kenal*. Mereka masih belum memikirkan soal potensi dan kapabilitas Caleg,” ungkapnya (wawancara Senin 29 Juni, 2009).

Tampak jelas informan masih memiliki keyakinan bahwa masyarakat memilih cenderung berpikiran tradisional dan cenderung

etnosentris.

4.3.2. Faktor Internal

Kapasitas Potensi Diri Caleg

Kemampuan dan kapasitas Caleg dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi Aleg merupakan aspek yang amat menentukan pula. Kualitas pribadi seorang politisi perempuan itu bisa diperoleh dari pengalaman pekerjaan dan organisasi, tingkat pendidikan, profesi dan dalam konteks lokal di Sumatera Barat yakni dengan posisi mereka di tengah komunitas adat. Jabatan sebagai Ketua Bundo Kandung (lembaga adat yang khusus mewakili suara kaum perempuan dalam tatanan adat) menjadi amat dihargai masyarakat dan dipandang menjadi nilai lebih dalam pemenangan Pemilu.

Dari 6 informan yang diwawancarai dan ditanya kualitas sebagai caleg dalam konteks 1). Pendidikan dan profesi, 2). Pengalaman organisasi dan 3). Peran-status dalam keluarga dan kaum, hanya informan nomor 2 menjawab 3 aspek tersebut dalam kategori sangat penting. Lainnya menjawab yang sangat penting adalah pendidikan, profesi dan status-peran ditengah komunitas. Sementara informan lainnya menjawab 3 aspek tersebut dalam kriteria penting.

V. Analisa Pembahasan

Keberhasilan Caleg menjadi Aleg dan kegagalan Aleg untuk duduk kembali di periode kedua tak terlepas banyak aspek, mulai dari faktor eksternal seperti praktek sistem Pemilu dan kebijakan Parpol hingga faktor internal seperti kualitas dan potensi unggul si Caleg itu sendiri. Namun aspek lain yang lebih berperan besar dalam pemenangan Pemilu adalah kiat dan upaya yang menjadi strategi dalam memperjuangkan dan meraih kursi dewan perwakilan. Hal penting lainnya, kapital sosial atau modal sosial juga menjadi bagian dari aset politik yang memainkan peran dominan untuk bisa mendapatkan suara terbanyak.

Seperti dikatakan J.A Booth dan P.B Richard yang mengartikan modal politik sebagai aktifitas warga negara untuk mencapai kekuasaan dan demokrasi⁸, maka dalam upaya mencapai kekuasaan dan demokrasi

⁸ Mardian, "Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik", diperoleh dari <http://mardian.files.wordpress.com/2008/05/konversi-modal-sosial-menuju-modal-politik.pdf>. 11 Juli 2009.

itu diperlukan strategi dan usaha mengelola modal atau kapital sosial yang ada.

Dalam hal strategi, semua Aleg/Caleg cenderung berstrategi melakukan pemetaan wilayah, turba dan berhadapan dengan kosntituen, tapi agaknya yang benar-benar mempelajari situasi dan karakteristik masyarakat yang menjadi basis massa dan menganalisa wilayah yang berpeluang untuk memberikan suara terbanyak tak sepenuhnya dilakukan oleh keenam Caleg. Hanya 3 Caleg terpilih yang memperlihatkan kegigihan, konsistensi dan kejelian dalam melihat peluang dimana dan bagaimana suara banyak bisa diraih. Contohnya informan nomor 5 mengajukan usulan pindah Dapil ke pimpinan Parpolnya, setelah ia mengkalkulasi perkiraan suara yang akan diperoleh. Bila masih tetap di Dapil yang ditunjuk parpolnya, kemungkinan dia akan mendapat suara sedikit dan tak terpilih jadi Aleg.

Semua Caleg perempuan agaknya memiliki ide yang sama untuk tidak memberikan dana kontan secara langsung pada konstituen secara perorangan. Tampaknya tindakan ini mereka ambil karena bisa jadi terkait kondisi finansial (dana minim) atau berpikiran bahwa meski sudah diberi, belum tentu masyarakat mau memilih, maka dalam situasi ini, jaringan sosial dan kepercayaan dengan membina kedekatan emosional Caleg dengan pemilih menjadi hal penting untuk bisa berkkiprah dan eksis di ranah politik.

Dalam hal kapital sosial, konteks lokal Sumatra Barat nilai-nilai budaya masyarakat setempat (sebagai salah satu aspek kapital sosial) yang egaliter memandang kedudukan yang sama perempuan dan laki-laki dalam konteks adat, dan menerapkan sistem matrilineal. Nilai budaya demikian ini diharapkan akan berdampak pada keleluasaan perempuan Minang untuk berkkiprah di sektor publik dan turut berimbas menjadi faktor dominan untuk mendapatkan simpati dari komunitas masyarakat setempat.

Dalam kasus informan nomor 6, kapasitas dirinya sebagai Ketua Bundo Kanduang, tokoh pimpinan adat yang mewakili suara kaum perempuan di komunitas adat setempat menjadi nilai tambah. Status tersebut sebagai arena untuk bersosialisasi, dikenal masyarakat setempat dan mengenal lebih dekat dengan masyarakat. Alhasil, ia yakin mendapatkan suara banyak pada wilayah daerah asalnya itu saja tanpa harus susah payah menggarap massa di Kabupaten dan kota lainnya yang memang menjadi haknya untuk menggarap wilayah tersebut.

Keyakinannya untuk memperoleh suara secara pribadi (akhirnya memperoleh sebanyak 7.575) semakin bertambah karena sudah berstrategi mempelajari karakteristik masyarakat yang menjadi basis massanya itu, yang masih cenderung bersifat etnosentris, lebih mengutamakan putra daerah (*anak nagari dan kaum kerabat*). Ditambah lagi dengan status laki-laki disekitarnya (kakak kandung, ayah dan mamak) yang menjadi pendukung, tim sukses adalah kerabat dekatnya, orang terandang di tengah masyarakat, yakni sebagai Datuk Penghulu dan pemuka agama yang disegani.

Namun agaknya kondisi ini tak bisa digeneralisasi, harus melihatnya secara kontekstual dan kasus per kasus, karena kasus yang dialami informan nomor 1, yang juga memiliki ayah sebagai tokoh adat yang dikenal luas tak sepenuhnya bisa memberikan dukungan untuk kedua kalinya kepada Caleg ini. Agaknya yang menjadi persoalan dominan adalah membangun dan mempertahankan jejaring yang sudah ada dan memelihara kepercayaan konstituen yang sudah diraih lima tahun sebelumnya.

Dalam aspek kepercayaan dan jaringan, kasus informan nomor 3, yang terpilih kembali sebagai Aleg untuk kedua kalinya, dan hubungan dengan konstituenya tak harus dengan materi saja, atau mengandalkan karib kerabat semata, tapi membangun bentuk komunikasi dan ketokohan diri melalui kedekatan emosional yang sudah dilakukan jauh hari sebelum pemilihan periode berikutnya. Caleg informan nomor 3 ini mengolah kapital sosial dari aspek kepercayaan dengan konsisten kepada konstituen, berkomunikasi intens, bertatap muka, melakukan binaan dan memelihara jaringan yang dibuat secara pribadi, bukan atas nama partai sangat diutamakan dan dijaga. Meski jaringan itu pada komunitas kecil saja, seperti pedagang ikan keliling, pedagang buah. Namun semua itu dilakukannya dalam upaya memelihara kepercayaan yang sudah diberikan lima tahun lalu.

Informan nomor 6 juga melakukan hal sama, dekat dengan konstituen, fokus dan konsisten sehingga kadang rela berjauhan dengan keluarga untuk melakukan binaan dan persuasi kepada komunitasnya. Semuanya dalam upaya membentuk jaringan dan simpati masyarakat.

Muara dari adanya jaringan yang dibentuk dengan masyarakat merupakan kelompok binaan Caleg yang pada akhirnya akan berujung pada munculnya kepercayaan konstituen untuk memberikan hak pilihnya pada Caleg yang diyakini akan mampu menyalurkan aspirasi mereka.

Hanya saja membangun kepercayaan, seperti ini tidak terungkap pada 3 Aleg dan Caleg lainnya, bahwa mereka meski telah melaksanakan strategi memelihara kepercayaan dengan harus turba ke masyarakat binaan, tapi tampak tak tanggap dan serutin yang dilakukan 3 Aleg terpilih periode 2009-2014. Bahwa berhadapan dengan konstituen sekian jam perminggu, bahkan hanya tidur 3-5 jam sehari dua bulan menjelang Pemilu Legislatif rela dilakukan Caleg yang terpilih ini.

Pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya yang berada di komunitas setempat juga dikelola dengan baik oleh Caleg non etnis Minang. Salah seorang caleg etnis Tiog Hoa membuktikannya, bahwa informan nomor 5 ini cukup jeli memanfaatkan kapital sosial yang dimiliki. Memanfaatkan pola komunikasi dari mulut ke mulut kepada kelompok organisasi, kelompok ibadah dan pertemanan sebagai jaringan yang diandalkan untuk bisa memilikinya.

Meski terdapat variasi bentuk pemanfaatan kapital sosial untuk perolehan suara, bila dibawa ke situasi politik lokal di Sumbar sekarang ini, nilai-nilai tersebut masih merupakan suatu bentuk ikatan tradisional yang mewarnai sistem politik di Sumatra Barat sekarang ini.

VI. Simpulan

1. Perbandingan strategi Caleg perempuan dalam memenangkan kursi di lembaga perwakilan di Sumatra Barat sangat terkait dengan strategi pemetaan wilayah dan pengelolaan kapital sosial yang dimiliki dan modal sosial yang ada di sekitar lingkungan para Caleg. Dalam hal strategi, semua Caleg berada dalam garis yang sama, dengan melakukan pemetaan wilayah, namun tindak lanjutnya setelah itu berbeda-beda.
2. Variasi keunggulan, kelebihan dan kekurangan masing-masing Caleg/Aleg dapat dilihat dari kemampuan Aleg mengelola kapital sosial yang dimiliki. Bahwa ternyata kejelian dan konsistensi dalam memelihara, membangun kepercayaan konstituen, membina jaringan yang ada menjadi faktor dominan untuk bisa mendapatkan simpati konstituen. Kegagalan caleg untuk duduk kembali periode berikutnya disebabkan banyak faktor salah satunya dari strategi dan memanfaatkan kapital sosial yang ada, dan juga harus dilihat kasus per kasus. Namun cukup jelas praktek Pemilu dan kebijakan internal Parpol turut mempengaruhi perolehan suara Caleg.
3. Terkait dengan sistem nilai budaya lokal yang berperan dalam perolehan suara untuk bisa duduk di Parlemen, perempuan politisi di Sumatra Barat tak terlepas dari ikatan-ikatan tradisional yang masih melekat erat dengan budaya Minangkabau. Bahwa hubungan emosional dengan komunitas

masyarakat dan posisi jabatan adat baik yang dimiliki politisi perempuan atau kerabat perempuan sangat menentukan dalam mendapat simpati dan suara pemilih,

4. Bagi etnis non Minang tapi berpolitik di Ranah Minang, substansi dari ikatan tradisional berupa hubungan saling kenal dan emosional dengan masyarakat pemilih oleh para Caleg dan kerabatnya juga merupakan ikatan tradisional yang menjadi strategi dalam proses mendapatkan simpati dan suara dari para pemilih.

--[]--

Referensi

- Fukuyama, Francis. 2002. "Modal Sosial" hal 153-157 dalam *Kebangkitan Peran Budaya, Bagaimana Nilai-Nilai Membentuk Kemajuan Manusia*, ed Lawrence E Harrison dan Samuel P Huntington, Jakarta: LP3ES.
- Lawang, Robert M.Z. 2004. *Kapital Sosial, Dalam perspektif Sosiologik, Suatu Pengantar*, Depok: FISIP UI Press.
- Mardian, "Konversi Modal Sosial menuju Modal Politik", diperoleh 11 Juli 2009, dari website <http://mardian.files.wordpress.com/2008/05/konversi-modal-sosial-menuju-modal-politik.pdf>.
- Sanday, Peggy Reeves. 2002. *Women at the Center, Life in a Modern Matriarchy* Ithaca: Cornell University Press.
- Wieringa, Saskia. 1995. *Subversive Women*, New Delhi: Raj Press.